

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING, BARANG LAINNNYA DAN JASA SERTA RESIKO KEDEPAN.

Januari 2024 2,70% (y-on-y),

Februari 2024 3,01% (y-on-y),

Maret 2024 1,92% (y-on-y).

Bulan Januari 2024 inflasi *Year on Year* (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,70 %, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,17. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 4,50 % dengan IHK sebesar 108,82 dan terendah terjadi di Kota Kupang sebesar 1,86 % dengan IHK sebesar 105,26.

Bulan Februari 2024 inflasi *Year on Year* (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,01 %, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,00. Inflasi tertinggi terjadi di Maumere sebesar 3,46 % dengan IHK sebesar 106,56 dan terendah terjadi di Waingapu sebesar 2,22 % dengan IHK sebesar 105,70.

Bulan Maret 2024 inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan inflasi yang signifikan yang tercatat sebesar 1,92 %.

Secara (y-on-y) pada Maret 2024 terjadi inflasi sebesar 1,92 %. dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,85. Inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 2,15 % dengan IHK sebesar 106,25 dan terendah terjadi di Maumere sebesar 0,95 % dengan IHK sebesar 105,23. Kelompok Komoditas yang dominan memberikan andil/ sumbangan inflasi pada Maret 2024 secara (y-on-y), yaitu: beras sebesar 0,96 persen; daging ayam ras sebesar 0,28 persen; cabai rawit sebesar 0,19 persen.

Secara (*m-to-m*), pada Maret 2024 terjadi inflasi sebesar - 0,14 % atau terjadi deflasi, dimana terjadi penurunan harga pada 4 dari 11 kelompok pengeluaran. Komoditas yang dominan memberikan andil/ sumbangan deflasi (*m-to-m*) pada Maret 2024 yaitu: ikan tembang sebesar 0,11 %; tomat sebesar 0,11 %; daging babi sebesar 0,05 %; daging ayam ras sebesar 0,05 %; labu siam sebesar 0,04 %; ikan tongkol sebesar 0,03 %; bunga pepaya sebesar 0,03 %; pepaya muda sebesar 0,03 %; ikan selar sebesar 0,02 %; jeruk nipis sebesar 0,02 %; ikan layang sebesar 0,02 %; dan jagung pipilan sebesar 0,02 %. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (*m-to-m*), yaitu: beras sebesar 0,22 %; telur ayam ras sebesar 0,05 %; cabai rawit sebesar 0,05 %; pisang sebesar 0,04 %; sawi hijau sebesar 0,03 %; kangkung sebesar 0,03 %; bayam sebesar 0,02 %; dan bawang putih sebesar 0,02 %. Sedangkan untuk tingkat inflasi *year to date* (y-to-d) Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Maret 2024 adalah sebesar 0,67 %.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Klasifikasi permasalahan :

### **Ketersediaan pasokan :**

Pola Inflasi NTT Menjelang HBKN

Beras :

1. Sebagian besar pasokan beras di Provinsi NTT masih harus didatangkan dari luar daerah seperti Sulsel, NTB, dan Jatim
2. Periode hujan yang lebih pendek dari tahun lalu, sehingga ketersediaan pasokan tetap mendapatkan perhatian.

Ikan-Ikanan

1. Konsumsi ikan di NTT cukup tinggi sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi maupun deflasi secara keseluruhan.

Hortikultura

1. Inflasi komoditas hortikultura seperti tomat, cabai, dan bawang cenderung meningkat pada musim penghujan
2. Komoditas hortikultura sayuran seperti kangkung, sawi, dan bayam sebagian besar diproduksi oleh petani lokal NTT.

### **Keterjangkauan harga :**

- Berdasarkan pola historis dalam 6 tahun terakhir, Provinsi NTT cenderung mengalami kelangkaan komoditas-komoditas tertentu pada akhir tahun (November — Desember) hingga awal tahun (Januari — Februari). Selain itu pada momen Ramadhan/Idulfitri, Provinsi NTT juga selalu mengalami hal yang sama. Sehingga Inflasi tertinggi dalam satu tahun cenderung terjadi pada periode Desember — Januari seiring dengan momen perayaan Natal dan Tahun baru.
- Komoditas yang sering kali menjadi faktor utama inflasi di NTT sebagian besar berasal dari kelompok *Volatile Foods*, antara lain beras, daging dan telur ayam ras, bawang merah dan putih, cabai merah dan rawit, ikan kembung dan tongkol, serta kelompok AP terutama angkutan udara. Komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga memiliki bobot yang besar terhadap perhitungan inflasi
- permasalahan yang dihadapi antara lain produktivitas dan Indeks Pertanaman (IP) di NTT yang di bawah nasional rendah sehingga sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi dari luar daerah.

### **Kelancaran distribusi :**

- Pemetaan menggunakan *Global Neighboring Area* untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat ketergantungan berbeda terhadap inflasi NTT. Wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua memiliki dampak langsung terhadap inflasi di NTT. Sementara itu, wilayah lainnya memiliki dampak tidak langsung melalui perantara atau faktor lain.
- Tarif Angkutan Udara
  - Kondisi geografis NTT yang terdiri dari kepulauan membuat penerbangan menjadi

moda transportasi utama intra provinsi

- Maskapai yang beroperasi masih terbatas dan cenderung didominasi oleh satu maskapai.

### **Komunikasi efektif :**

- Belum ada koordinasi yang optimal dari berbagai stakeholder terkait tentang pentingnya pengendalian inflasi secara kontinyu.

### **3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

Upaya Pengendalian Inflasi oleh Provinsi NTT, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT (TPID NTT) berupa kegiatan melakukan pengendalian Inflasi diantaranya:

1. Mengikuti Rakornas Mingguan Pengendalian Inflasi secara Online yang dilaksanakan setiap minggu pada triwulan I Tahun 2024.
2. Melaksanakan Rapat Teknis TPID pengendalian inflasi di bulan November dan Desember 2023.
3. TPID Provinsi NTT melakukan kunjungan ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pasca ditetapkan sebagai wilayah perhitungan IHK baru. Bersama Bupati melakukan kunjungan ke lokasi sentra produksi Jagung, Tomat, Cabe Keriting di Kelurahan Oekefan - TTS
4. Melakukan Sidak Pasar Oeba dan kunjungan ke *Cold Storege* Ikan di TPI Oeba bersama Gubernur NTT.
5. Menyelenggarakan Pasar Murah Bersubsidi yang bertempat di halaman Kantor Gubernur NTT.
6. Melakukan Survei Harga Pasar, Gudang Bulog dan Sentra Produksi serta kunjungan ke PT. Charoen Phokpan Jaya Farm Perusahaan Pembibitan ayam Broiler di Desa Oefafi Kec. Kupang Timur.
7. Melaksanakan *High Level Meeting Tim* Pengendalian Inflasi Daerah (HLM - TPID) Provinsi NTT bulan Februari 2024.
8. Kunjungan Kerja Pj. Gubernur NTT ke Kab. TTS pasca ditetapkan sebagai wilayah perhitungan IHK dimana pada Januari 2024 angka inflasi Kab. TTS sangat tinggi yaitu 4.50% (*y-on-y*), dan membuka kegiatan TPID NTT yaitu Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Nonohonis dan Gerakan Pangan Murah Bersubsidi di desa Nunumeu.
9. Kolaborasi TPID Provinsi NTT bersama TPID Kota Kupang melakukan sidak pasar Tradisional dan Modern yaitu di pasar Oebobo dan Indomaret, Lokasi Bongkar Beras Import di pelabuhan Tenau Kupang dan Gudang Distributor di Alak.
10. TPID Provinsi NTT Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang HBKN Idul Fitri 1445 H Tahun 2024.
11. Sinergi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan HLM TPID Kota Kupang, Kab. Manggarai Barat, Kab. Ende, dan Kab. Nagekeo; Rapat koordinasi TPID Balinusra; Rapat Koordinasi dengan Pemilik Rumah Pangan Kita (RPK) Mitra Bulog oleh TPID Kab. Sumba Barat; Gerakan Tanam Cabai oleh TP-PKK di Kota Kupang; Urban Farming Komoditas Hortikultura oleh TPID Kab. Sumba Tengah; Belanja Murah dengan QRIS di Kota Kupang dan Maumere; Gerakan Pangan Murah di Kab. Ende, Kota Kupang, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Malaka, Kab. Belu, dan Kab. SBD; Pemantauan Harga dan Stok Bulog di Kota Kupang oleh TPID Kota Kupang; Sidak Pasar dan Distributor oleh TPID Kota Kupang, Kab. Sumba Tengah, Kab.

Kupang; Diseminasi prakiraan awal musim kemarau oleh BMKG dengan TPID NTT

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Berbagai kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota se NTT kurun waktu Januari 2024 s/d Maret 2024 sudah sesuai (On The Track) sehingga tercatat perkembangan inflasi YoY Provinsi NTT ke arah yang lebih baik yaitu :

Bulan Januari 2024 Inflasi NTT tercatat sebesar 2,70%,

Bulan Februari 2024 sebesar 3,01% dan

Bulan Maret 2024 sebesar 1,92%.

Sehingga kegiatan-kegiatan seperti Sidak Pasar, Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah Bersubsidi dan Non Subsidi tersebut tetap dan akan ditingkatkan pada waktu - waktu selanjutnya.

2. Komoditas beras terjadi kenaikan harga di seluruh wilayah Provinsi NTT, bersamaan progres pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan pasokan komoditas beras tercatat = 2,97 Bulan kedepan, ketahanan stock = 267.668,36 ton (*data SP2KP bulan Maret 2024*) disamping kegiatan bantuan pangan yang relatif berjalan sampai dengan Maret 2024 serta penyaluran beras SPHP terus dilakukan.
3. Prospek inflasi Provinsi NTT secara (*y-on-y*) pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan masih terkendali pada sekitar titik tengah kisaran target  $2,5 \pm 1\%$ .
4. Inflasi pada komoditas *volatile food* diperkirakan terkendali pada sasaran 5,00% (*y-on-y*) ditopang oleh program pengendalian inflasi jangka pendek dan menengah panjang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan 4K pengendalian inflasi :

▪ Keterjangkauan Harga

1. Mengintensifkan pelaksanaan program Operasi Pasar Murah (OPM) Bersubsidi dengan Skema Subsidi Ongkos Angkut (SOA), baik di pasar, kelurahan, rumah ibadah maupun pada saat *event*
2. Pembentukan dan penguatan peran BUMD Pangan sebagai off taker khususnya di Kota IHK seiring dengan penambahan kota IHK di Kabupaten Ngada dan TTS, guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
3. Mendorong realisasi anggaran Dekonsentrasi daerah dari Bapanas untuk mendukung pengendalian inflasi.
4. Melakukan upaya normalisasi harga beras melalui program SPHP secara masif bersama Perum Bulog, serta mendorong realisasi penyaluran bantuan pangan 2024.

◦ Ketersediaan pasokan :

1. Merutinkan Sidak Pasar, Operasi Pasar, dan Pemantauan ke Pasar maupun Gudang Distributor sebagai upaya normalisasi harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan pasokan.
2. Optimalisasi dan perluasan KAD serta memastikan bahwa KAD terealisasi

sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasokan pangan.

3. Melakukan upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi melalui penggunaan varietas unggul, pengembangan bibit mandiri, percepatan tanam pada daerah irigasi, maupun optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan pada komoditas beras.
4. Penguatan adopsi *digital farming* dalam produksi komoditas strategis.
5. Melakukan antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadhan dan HBKN Idulfitri melalui penyimpanan atau pencadangan komoditas terutama hortikultura.

◦ Kelancaran Distribusi:

1. Melanjutkan program subsidi ongkos angkut dengan anggaran pemerintah (alokasi Dana Transfer Umum dan Belanja Tidak Terduga ).
2. Menjamin kelancaran distribusi melalui perbaikan akses (jalan, jembatan, Pelabuhan) antar Kabupaten/Kota.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok serta meningkatkan peran distributor dan subdistributor.
4. Mendorong kerja sama dengan pihak swasta dan sinergitas lintas sektoral untuk meningkatkan intensitas dan konektivitas moda transportasi di Provinsi NTT dengan karakter kepulauan.

◦ Komunikasi Yang Efektif :

1. Melanjutkan gerakan *urban farming dan rural farming* di kalangan masyarakat : ASN, gereja, pesantren dan sektor swasta.
2. Optimalisasi publikasi PIHPS sebagai sumber informasi harga komoditas pangan strategis.
3. Informasi harga terkini di pasar melalui billboard yang dipasang di lokasi strategis di area pasar sehingga dapat menekan ekspektasi harga masyarakat.
4. Kerja sama dengan akademisi untuk melakukan feasibility study dalam rangka pemanfaatan program bantuan *cold storage, CAS*, maupun subsidi ongkos angkut oleh Bappenas.
5. Mempersiapkan dan menyusun program Championship TPID Provinsi NTT 2024, baik Laporan Self Assessment maupun Laporan *One Page Summary* (OPS). *Deadline* pengumpulan Laporan kepada Kemendagri dan Kemenko RI pada tanggal 23 Februari 2024 melalui website TPIN.